

IMPLEMENTASI WEBSITE PPID KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Maulvi Ihya Arrofi
NPP. 32.0024

Asdaf Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: 32.0024@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Megandaru Widhi Kawuryan, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This study focuses on the issue of the suboptimal implementation of the PPID website in Southwest Aceh Regency, which has hindered the realization of public information transparency due to technical limitations, lack of socialization, and low community participation. **Purpose:** The aim of this study is to analyze the implementation of the PPID website in achieving public information transparency in Southwest Aceh Regency. **Method:** This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews with 10 informants, observation, and documentation. The collected data is then analyzed using Grindle's (1980) policy implementation theory, which covers the dimensions of the content of policy, context of implementation, and outcomes. This research was conducted from January 6 to 25, 2025, with the goal of developing an in-depth understanding of the implementation of the PPID website in realizing public information transparency in Southwest Aceh Regency. **Result:** The findings indicate that the implementation of the PPID website in Southwest Aceh Regency has contributed positively to public information transparency, particularly in terms of information accessibility. However, challenges persist in the content of policy dimension, including delays in updating information and the lack of interactive features on the website. In the context of implementation dimension, there are challenges in socializing the public's right to access information and the low technical understanding among users. Meanwhile, in the outcome dimension, although the website has made information access easier, its effectiveness remains limited due to infrastructure constraints and the limited capacity of human resources in managing the website. **Conclusion:** The implementation of the PPID website in Southwest Aceh Regency has positively contributed to public information transparency but still requires improvements in several aspects, such as timely information updates, enhancing interactive features, and better socialization of public information access rights. To enhance the effectiveness of the PPID website, improvements are needed in technological infrastructure, human resource capacity for website management, and further education for the public regarding the benefits and usage of the website to access public information. **Keywords:** Website Implementation, PPID, Public Information Transparency, Southwest Aceh Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada permasalahan implementasi website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya yang belum optimal dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik akibat keterbatasan teknis, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi website PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Barat Daya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 10 informan, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980), yang mencakup dimensi *content of policy*, *context of implementation*, dan *outcome*. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 dengan tujuan menyusun pemahaman mendalam mengenai penerapan implementasi website PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Barat Daya. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah memberikan kontribusi positif dalam keterbukaan informasi publik, terutama dalam hal aksesibilitas informasi. Namun, terdapat kendala pada dimensi *content of policy* terkait keterlambatan pembaruan informasi dan kurangnya fitur interaktif pada website. Pada dimensi *context of implementation*, terdapat tantangan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak akses informasi publik dan rendahnya pemahaman teknis di kalangan pengguna. Sementara itu, pada dimensi *outcome*, meskipun website telah mempermudah akses informasi, efektivitasnya masih terbatas karena kendala infrastruktur dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan website. **Kesimpulan:** Implementasi website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya telah memberikan kontribusi positif terhadap keterbukaan informasi publik, namun masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek, seperti pembaruan informasi yang tepat waktu, peningkatan fitur interaktif, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak akses informasi. Untuk meningkatkan efektivitas website PPID, perlu dilakukan perbaikan pada infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan website, serta edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan website dalam memperoleh informasi publik.

Kata kunci: Implementasi Website, PPID, Keterbukaan Informasi, Kabupaten Aceh Barat Daya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan informasi publik (Mokobombang et al., 2023). Salah satu inovasi utama dalam pemerintahan yang berbasis teknologi adalah penggunaan website sebagai platform untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Website pemerintah, khususnya website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diharapkan dapat menjadi alat transparansi dan akuntabilitas yang efektif bagi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, peraturan, dan program-programnya kepada publik. Dalam konteks ini, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bagian dari pemerintah daerah, berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui implementasi website PPID.

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengakses informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di

tingkat daerah (Muhammad, 2017). Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi publik masih ditemukan di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan teknologi untuk memastikan informasi dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat (Nasution, 2024).

Website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan dapat meningkatkan akses informasi publik. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya, seperti kurangnya fitur interaktif, keterlambatan dalam pembaruan informasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak akses informasi. Selain itu, karakteristik sosial dan geografis Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sebagian besar penduduknya tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap teknologi dan internet, semakin memperburuk tantangan dalam memastikan bahwa website dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Temuan Chairunnisa et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada dua faktor utama, yakni konten kebijakan dan konteks kebijakan, yang juga berperan dominan dalam pelaksanaan di tingkat daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas website PPID, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem penyampaian informasi yang lebih transparan, efisien, dan inklusif di Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Tjoetra (2018) dan Degodona et al. (2021), telah membahas aspek kinerja dan kepatuhan badan publik dalam penyelenggaraan layanan informasi melalui website PPID. Namun, studi-studi tersebut masih terbatas pada pengukuran administratif dan kinerja teknis, tanpa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penghambat implementasi, khususnya dalam konteks daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan partisipasi masyarakat yang rendah. Kajian yang mengintegrasikan faktor teknis, sosial, dan manajerial secara simultan dalam implementasi PPID di daerah pinggiran masih jarang ditemukan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur penerimaan pengguna atau efektivitas pelayanan informasi publik, seperti terlihat pada studi Swadati & Sfenrianto (2022) yang menggunakan model TAM. Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengevaluasi dinamika internal instansi pengelola PPID, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pembaruan informasi, dan kurangnya interaktivitas sistem digital yang digunakan. Aspek penting lain yang juga belum banyak diteliti adalah bagaimana strategi sosialisasi dan literasi informasi publik kepada masyarakat daerah turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji implementasi website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya secara holistik, dengan menelaah dimensi kebijakan, konteks pelaksanaan, dan hasil implementasi berdasarkan teori Grindle. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek teknis dari website PPID, tetapi juga mengevaluasi kesiapan kelembagaan,

kualitas SDM, dan keterlibatan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan layanan informasi publik. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan e-government yang lebih inklusif dan adaptif, serta memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan transparansi informasi publik di wilayah-wilayah dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur digital.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Tjoetra (2018) dengan judul *“Peningkatan Kepatuhan Badan Publik Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat”*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokus pada keterbukaan informasi publik melalui website PPID di tingkat pemerintah daerah, yakni Kabupaten Aceh Barat Daya. Keduanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar hukum. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian Tjoetra menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi untuk menggali lebih dalam tantangan dalam implementasi website PPID, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei untuk menilai kesiapan dan upaya pemerintah dalam menyediakan informasi publik. Penelitian ini lebih fokus pada analisis mendalam terhadap hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan website PPID, sedangkan penelitian Tjoetra lebih berorientasi pada pengukuran kinerja dan feedback yang diterima oleh instansi pemerintah.

Kedua, penelitian oleh Degodona et al. (2021) dengan judul *“Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi”*. Persamaan antara penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di tingkat pemerintahan daerah, dengan menggunakan PPID sebagai sarana untuk menyediakan informasi publik. Keduanya juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah mengelola dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat melalui platform digital, yaitu website PPID. Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif terkait tantangan dan kendala teknis dalam pengelolaan website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya, sementara penelitian Degodona menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei untuk menilai kesiapan dan kinerja pelayanan informasi di Kabupaten Toba. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada evaluasi infrastruktur dan sosialisasi, sedangkan penelitian Degodona mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dalam implementasi UU KIP.

Ketiga, penelitian oleh Santia & Mauliansyah (2023) yang berjudul *“Analisis Pemanfaatan SP4N Lapor Untuk Meningkatkan E-government di Diskominsa Aceh Barat Daya”*. Penelitian ini dan penelitian mengenai pemanfaatan SP4N Lapor untuk meningkatkan e-government di Aceh Barat Daya memiliki persamaan dalam hal keduanya berfokus pada peningkatan keterbukaan informasi publik melalui teknologi, yaitu website PPID dan SP4N Lapor. Keduanya juga mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi oleh pemerintah daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada jenis platform yang dikaji: penelitian ini meneliti website PPID sebagai alat untuk keterbukaan informasi publik, sedangkan penelitian Santia & Mauliansyah lebih fokus pada SP4N Lapor sebagai media pengaduan publik yang bertujuan untuk mempercepat respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tantangan teknis, sedangkan penelitian mengenai SP4N Lapor menggunakan deskriptif kualitatif dengan fokus pada evaluasi sistem pengaduan dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Keempat, penelitian oleh Tejedo-romero et al. (2025) yang berjudul *“The Usability Of Brazilian Government Open Data Portals : Ensuring Data Quality”*. Penelitian ini dan penelitian mengenai portal

data terbuka memiliki kesamaan dalam fokus meningkatkan transparansi dan akses informasi publik melalui platform digital, yaitu website PPID dan portal data terbuka. Perbedaannya terletak pada konteks, di mana penelitian ini menganalisis implementasi PPID di Aceh Barat Daya dengan tantangan lokal, sementara penelitian Brasil menilai praktik tata kelola data terbuka di tingkat makro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi tantangan teknis, sedangkan penelitian Brasil menggunakan survei kuantitatif untuk menilai dampak tata kelola data. Maulvi fokus pada perbaikan teknis website, sementara penelitian Brasil berfokus pada peningkatan tata kelola data dan kesadaran pengguna. Kedua penelitian menekankan pentingnya keterlibatan pengguna dan sosialisasi, namun dengan pendekatan berbeda.

Kelima, penelitian oleh Swadati & Sfenrianto (2022) tentang "*Analysis of Factors Affecting User Acceptance of The Ministry of Defense Information and Documentation Management Officer (PPID) Website*" Penelitian ini dan penelitian mengenai penerimaan pengguna website PPID memiliki kesamaan dalam fokus pada transparansi informasi publik melalui website PPID. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan: penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi tantangan implementasi di Aceh Barat Daya, sementara penelitian Swadati & Sfenrianto menggunakan model kuantitatif Technology Acceptance Model (TAM) untuk mengukur penerimaan pengguna di Kementerian Pertahanan. Penelitian Swadati & Sfenrianto lebih fokus pada kendala teknis dan sosial, sementara penelitian ini menilai variabel seperti kualitas layanan dan website. Penelitian ini berfokus pada perbaikan infrastruktur dan kapasitas SDM, sedangkan penelitian Swadati & Sfenrianto merekomendasikan peningkatan kualitas layanan untuk meningkatkan penerimaan pengguna. Kedua penelitian menekankan pentingnya keterlibatan pengguna, tetapi dengan pendekatan yang berbeda.

Keenam, penelitian oleh Liu & Ping (2025) tentang "*Tracking Control of Multi-Agent Systems Using a Networked Predictive PID Tracking Scheme*". Penelitian ini mengenai sistem kontrol multi-agen jaringan memiliki persamaan dalam penggunaan metode PPID, tetapi dalam konteks yang sangat berbeda. Keduanya menggunakan pendekatan berbasis PPID, namun penelitian ini fokus pada implementasi website PPID untuk transparansi informasi publik, sementara penelitian Liu & Ping membahas penggunaan PPID dalam sistem kontrol industri yang melibatkan agen jaringan. Perbedaan utama terletak pada bidang aplikasinya; penelitian Liu & Ping berfokus pada pengelolaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah, sedangkan penelitian Liu & Ping berfokus pada kontrol dinamis dalam sistem industri yang melibatkan agen jaringan yang saling berkomunikasi. Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan teknis dalam implementasi website, sedangkan penelitian Liu & Ping menggunakan teknik kontrol matematis dan analisis stabilitas dalam sistem multi-agen. Penelitian Maulvi lebih berorientasi pada masalah sosial dan teknis di sektor pemerintahan, sementara penelitian Liu & Ping berorientasi pada penerapan teknologi dalam sistem industri. Kedua penelitian menggunakan PPID, namun dengan tujuan dan konteks yang sangat berbeda.

Ketujuh, penelitian oleh Pratama et al. (2017) yang berjudul "*Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*". Persamaan antara kedua penelitian terletak pada fokusnya yang sama-sama mengkaji implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan website PPID di tingkat pemerintahan daerah. Kedua penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai landasan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menyediakan akses informasi publik secara transparan dan efisien. Perbedaannya, terletak pada konteks dan lokasi penelitian: penelitian pertama fokus pada Kabupaten Sumedang dengan permasalahan keterbatasan teknis dan implementasi kebijakan yang belum optimal, sedangkan penelitian kedua mengkaji Kabupaten Aceh Barat Daya, yang juga menghadapi tantangan serupa namun dengan permasalahan tambahan terkait akses internet yang terbatas di daerah terpencil serta rendahnya literasi digital masyarakat. Keduanya menyoroti pentingnya

perbaikan dalam pembaruan informasi, kapasitas SDM, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas website PPID dalam meningkatkan transparansi public.

Kedelapan, penelitian oleh Ardieansyah (2022) yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Website “Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)” Terhadap Kepuasan Pengguna Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya*”. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan metode yang digunakan dalam menganalisis implementasi website PPID. Penelitian pertama, yang dilakukan di Kabupaten Pematang Jaya, mengukur kualitas website PPID melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model Webqual 4.0, yang menilai kualitas kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi layanan, serta pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna website. Sementara itu, penelitian kedua, yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya, mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, untuk menganalisis implementasi website PPID dalam mencapai keterbukaan informasi publik, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle. Penelitian Aceh Barat Daya lebih berfokus pada tantangan sosial dan teknis dalam pengelolaan website, seperti keterlambatan pembaruan informasi, rendahnya pemahaman teknis pengguna, serta kendala infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas. Kedua penelitian menyoroti pentingnya transparansi informasi, namun berbeda dalam cara mereka mengkaji masalah dan solusi yang diusulkan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dari penelitian “*Implementasi Website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik*” terletak pada pendekatan analisis yang digunakan untuk menggambarkan tantangan teknis dan sosial secara mendalam dalam konteks lokal Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini memperkaya literatur dengan menyoroti keterbatasan aktual dalam pengelolaan dan optimalisasi website PPID sebagai alat transparansi publik. Berbeda dengan penelitian Tjoetra (2018) dan Degodona et al. (2021) yang lebih menekankan pada evaluasi kinerja berbasis survei kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori implementasi kebijakan Grindle untuk mengevaluasi aspek konten kebijakan, konteks pelaksanaan, dan hasil kebijakan secara menyeluruh, khususnya dalam dimensi teknologi, sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat.

Lebih lanjut, kontribusi kebaruan juga tercermin dari fokus penelitian yang mengangkat dinamika lokal dan karakteristik geografis unik Aceh Barat Daya, yang belum banyak diungkap dalam studi sebelumnya. Tidak seperti penelitian Swadati & Sfenrianto (2022) yang berfokus pada penerimaan pengguna terhadap website PPID di institusi nasional, penelitian ini menelusuri hambatan aktual yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk keterbatasan infrastruktur internet dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat setempat. Perspektif ini memperkaya kajian keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan aspek inklusivitas akses, khususnya dalam konteks daerah yang masih tertinggal secara teknologis dan geografis.

Selain itu, penelitian ini menyentuh aspek strategis yang tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga pada efektivitas interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menyoroti kekurangan fitur interaktif, keterlambatan pemutakhiran informasi, serta rendahnya sosialisasi hak-hak informasi publik, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yang memadukan evaluasi teknis dan sosiologis dalam satu kerangka analitis. Pendekatan ini menghasilkan rekomendasi praktis dan aplikatif yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan website PPID, menjadikannya sebagai referensi penting dalam pengembangan e-government daerah yang lebih adaptif dan partisipatif.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi website PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Barat Daya.

II. METODE

Menurut Simangunsong F. (2017), metode penelitian merupakan serangkaian teknik ilmiah yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi website PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Barat Daya (Utomo et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara komprehensif berdasarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan tantangan teknis, kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam akses informasi publik. Seperti dikemukakan Sugiyono (2023), metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam menjaring data yang mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, sehingga mampu menggambarkan konteks sosial dan kelembagaan secara lebih tajam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam terhadap 10 informan kunci yang terdiri dari pengelola PPID, pejabat pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh observasi langsung terhadap penggunaan dan tampilan website PPID, serta dokumentasi kebijakan dan laporan internal terkait pengelolaan informasi publik. Informan dipilih secara purposif berdasarkan peran mereka dalam pengelolaan atau pemanfaatan informasi publik, sehingga informasi yang diperoleh memiliki relevansi tinggi terhadap tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan fokus pada pemahaman menyeluruh terhadap efektivitas implementasi sistem digital PPID sebagai sarana transparansi publik yang adaptif dan inklusif.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980) yang menitikberatkan pada tiga dimensi utama, yaitu content of policy (substansi kebijakan), context of implementation (konteks pelaksanaan), dan outcome (hasil kebijakan). Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun kondisi eksternal masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi secara sistematis tantangan dan peluang dalam pelaksanaan website PPID, serta memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik di daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Isi Kebijakan (Content of Policy)

Isi kebijakan merupakan dimensi pertama dalam teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980), yang mencakup kejelasan tujuan, sumber daya, serta instruksi atau pedoman pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya, isi kebijakan berkaitan langsung dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.1.1 Tujuan Kebijakan

Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah: meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dan dari Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2024 memberikan pedoman rinci mengenai pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di tingkat kabupaten. Peraturan ini memuat ruang lingkup, tata cara, dan mekanisme operasional pengelolaan informasi, mulai dari penyusunan hingga penyebaran kepada masyarakat. Salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan selalu relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui peraturan ini, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berupaya menata layanan informasi publik agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ubarizal, ST. (Kepala DISKOMINSA) pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 10.00 WIB dan Mawardi, S.H. (Sekretaris DISKOMINSA) pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 13.00 WIB, diketahui bahwa pengembangan website PPID memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses informasi publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

“Website ini dikembangkan agar masyarakat bisa mengakses informasi publik tanpa harus datang ke kantor. Ini juga bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya bersifat administratif atau teknis semata, melainkan merupakan manifestasi dari komitmen normatif dan etis pemerintah daerah terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan badan publik menyediakan akses informasi yang mudah dan efisien kepada masyarakat.

3.1.2 Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan yang komprehensif, terutama dari sisi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi, dan anggaran yang memadai. Sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan operasional sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsa) Kabupaten Aceh Barat Daya, staf yang terlibat dalam pengelolaan PPID harus memiliki kompetensi yang mumpuni, baik dalam hal pengelolaan informasi publik maupun dalam memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Selain itu, infrastruktur teknologi yang mendukung harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan sistem informasi secara optimal. Ini termasuk sistem server yang stabil, jaringan internet yang cepat, dan perangkat keras yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional website PPID. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, baik untuk pengadaan perangkat keras maupun untuk pelatihan SDM, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui website PPID dapat terhambat. Dengan demikian, untuk menjalankan kebijakan ini secara efektif, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ketiga komponen ini—SDM, infrastruktur teknologi, dan anggaran—terpenuhi dengan baik dan dapat saling mendukung satu sama lain dalam mendukung transparansi informasi publik.

3.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Website dikelola oleh tim internal DISKOMINSA dengan latar belakang keahlian di bidang teknologi informasi. Beberapa di antaranya adalah Ferial Willy Sarjana, S.Kom. (Pranata Komputer), Nur Kemala Sari, S.I.Kom. (Penyusun Informasi dan Publikasi), Achmad Rianda, S.I.Kom. (Pengelola Dokumentasi), dan Zeki Restoena, S.TA., S.I.Kom., yang juga berperan sebagai operator pengelolaan teknis konten dan unggahan website.

“Zeki biasanya jadi operator utama. Kalau ada informasi masuk, dia yang unggah ke website. Tapi kadang info-nya telat datang dari SKPD lain.”

“Secara SDM sebenarnya ada yang bisa mengelola website, tapi masih perlu pelatihan rutin agar lebih paham tentang standar pengelolaan informasi publik.”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Nur Kemala Sari dan Muammar Asmady, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya telah didukung oleh SDM

dengan latar belakang yang relevan, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini merupakan aspek positif yang menunjukkan bahwa pada dasarnya, sumber daya manusia tersedia dan memiliki kompetensi dasar teknis dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan website. Namun demikian, dari sisi kualitas pengelolaan, masih terdapat tantangan berupa kebutuhan peningkatan kapasitas dan pelatihan secara berkelanjutan. Hal ini diungkapkan oleh Muammar Asmady yang menyoroti pentingnya pelatihan rutin agar SDM tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memahami standar layanan informasi publik, seperti ketepatan waktu unggahan, klasifikasi informasi, dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008.

3.1.2.2 Infrastruktur Teknologi

Menurut Mahfudhi, S.Kom. (Kabid E-Government), sudah tersedia server lokal dan jaringan pendukung. Namun, masih perlu peningkatan kecepatan akses dan dukungan teknis untuk menjaga kestabilan layanan. Saat melakukan observasi langsung di kantor diskominsa kabupaten Aceh Barat Daya server yang digunakan masih menumpang di server milik dinas bkpsdm kabupaten Aceh Barat Daya yang mana jarak kedua kantor tersebut berdekatan.

3.1.2.3 Instruksi Kebijakan

Pelaksanaan pengelolaan informasi pada website PPID telah memiliki dasar hukum dan pedoman teknis seperti: SOP PPID Kabupaten Aceh Barat Daya, Peraturan Bupati tentang PPID, SK Penunjukan, PPID Utama dan PPID Pembantu. Terkait SK terdapat surat keputusan Bupati nomor 308 tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya. Yang mana bertujuan untuk memperjelas jabatan dan tanggung jawab dalam mengelola atau memberikan informasi kepada sekretariat PPID yakni pihak Diskominsa kabupaten Aceh Barat daya. Namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Koordinasi antar SKPD masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pengiriman dan sinkronisasi informasi.

Gambar 1 SOP alur pengumpulan data dan pengolahan data

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan2024 Tanggal Revisi Tanggal Efektif2024 Disahkan oleh Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, DARMANSAH	
	Nama/Judul SOP Pelayanan Informasi Publik	
	Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	
	Kualifikasi Pelaksana: 1. PPID memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. PPID Pembantu memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional memiliki kewenangan di bawah PPID Utama maupun PPID Pembantu dan/atau petugas meja Informasi memiliki kemampuan dibidang : 1. Memahami pendokumentasian dan kearsipan 2. Memahami dan dapat menguasai IT, 3. Memiliki sertifikasi tentang pelayanan publik 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung Pelayanan Informasi Publik	

Keterkaitan : SOP ini terkait dengan : 4. SOP Pengumpulan, Pendokumentasian, dan Penyimpanan Informasi Publik 5. SOP Penetapan Informasi Yang Dikecualikan/Rahasia 6. SOP Pengelolaan Keberatan Layanan Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan : 6. Meja informasi 7. Website 8. Papan pengumuman 9. Komputer 10. Printer 11. Scanner 12. Telepon dan fax 13. Internet 14. Nota dinas/surat 15. Formulir-formulir pelayanan informasi
Peringatan : SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.	Pencatatan dan Pendataan : 1. Tanda terima permohonan informasi 2. Buku register Permohonan Informasi 3. Informasi yang diumumkan melalui website dan papan pengumuman

A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PENGUMUMAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		KET
		PPID	PPID Pembantu	Tenaga pembantu admn/fungsional	Petugas Meja Informasi	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	
11.	PPID membuat dan mengirimkan Nota Dinas/ Surat kepada PPID Pembantu agar menyiapkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dalam Daftar Informasi Publik					Nota Dinas/Surat	1 hari kerja	Nota Dinas/Surat
12.	PPID Pembantu mendisposisi Nota Dinas dari PPID kepada Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional untuk mengumpulkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Daftar Informasi Publik					Nota Dinas /Surat	1 hari kerja sejak menerima nota dinas / surat dari PPID	• Nota Dinas/ Surat • Daftar Informasi Publik

Sumber : Perbub Kabupaten Aceh Barat Daya No 12 Tahun 2024 Tentang PPID

3.2 Context of Implementation (Konteks Implementasi)

Konteks implementasi merujuk pada lingkungan sosial, politik, dan organisasi yang memengaruhi jalannya implementasi kebijakan publik. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kondisi eksternal (dukungan politik dan kebijakan), internal organisasi (struktur, koordinasi), serta respons dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam konteks website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya, ketiga indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana konteks mendukung atau justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

3.2.1 Dukungan Politik

Dukungan politik lokal sangat penting karena ia menentukan arah kebijakan dan pengalokasian sumber daya. Hasil wawancara dengan Ubarizal, ST. (Kepala DISKOMINSA) dan Mawardi, S.H. (Sekretaris DISKOMINSA) mengindikasikan bahwa komitmen politik dari pimpinan daerah telah diberikan melalui:

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang PPID.
- SK penunjukan PPID Utama dan Pembantu.
- Penyediaan anggaran tahunan, meskipun masih terbatas, dan tidak terplot dengan maksimal.

Dukungan politik merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh Grindle (1980) dalam dimensi “Context of Implementation”. Dalam konteks pelaksanaan website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil wawancara dengan Ubarizal, S.T. dan Mawardi, S.H. menunjukkan bahwa dukungan politik dari pimpinan daerah telah tersedia secara formal dan substansial.

Bukti nyata dari dukungan ini terlihat melalui penyusunan Peraturan Bupati tentang PPID, SK penunjukan PPID Utama dan PPID Pembantu, serta alokasi anggaran tahunan, meskipun belum optimal secara nominal maupun distribusi. Komitmen tersebut menjadi bentuk legitimasi politik terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari agenda tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pernyataan Mawardi yang menyebut bahwa Bupati secara langsung menekankan pentingnya keterbukaan informasi menegaskan bahwa dukungan tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi juga ditunjukkan melalui arahan langsung dari pimpinan daerah. Ini adalah modal politik yang sangat penting karena memberikan dasar bagi Diskominsa dan seluruh PPID pembantu untuk

bekerja dengan legitimasi penuh. Namun demikian, penulis menilai bahwa dukungan politik ini belum sepenuhnya diiringi dengan kekuatan eksekusi di tingkat bawah, khususnya dalam hal komitmen dan kesiapan SKPD lain sebagai PPID Pembantu. Dengan kata lain, dukungan dari atas belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di tingkat operasional. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara komitmen normatif dan pelaksanaan teknis, yang pada akhirnya menghambat efektivitas website PPID dalam menyediakan informasi secara cepat dan merata.

3.2.2 Karakteristik Organisasi

Organisasi pengelola website PPID berada di bawah koordinasi DISKOMINSA sebagai PPID Utama. Struktur organisasi telah dibentuk sesuai aturan, dengan dukungan dari beberapa bidang teknis dan staf fungsional. Namun, permasalahan muncul dalam aspek koordinasi dan standarisasi kerja.

Beberapa temuan penting:

- a. Tidak semua SKPD memahami tugas sebagai PPID Pembantu.
- b. Proses pengiriman data sering bersifat manual dan tidak mengikuti jadwal.
- c. Pengelolaan konten website masih tergantung pada inisiatif staf, belum sepenuhnya sistematis.

Struktur organisasi pengelola website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya telah dibentuk secara formal dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, di mana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DISKOMINSA) berperan sebagai sekretariat PPID. Ketersediaan struktur ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, kerangka operasional pengelolaan informasi publik sudah dirancang secara sistematis. Namun demikian, hasil wawancara dan temuan lapangan menunjukkan bahwa karakteristik organisasi sebagai pelaksana kebijakan belum berjalan secara optimal. Seperti diungkapkan oleh Muammar Asmady dan Nur Kemala Sari, koordinasi antar-SKPD belum berjalan baik, yang ditandai dengan ketidakteraturan pengiriman data, kurangnya pemahaman tugas sebagai PPID Pembantu, dan tidak adanya sistem kontrol atas kualitas dan format data yang dikirim. Fakta bahwa proses pengumpulan data masih manual dan tidak mengikuti jadwal tetap, serta pengelolaan konten website sangat tergantung pada inisiatif individu staf, menunjukkan bahwa organisasi belum menjalankan fungsi koordinatif dan teknokratis secara optimal. Ini mencerminkan kelemahan dalam aspek standarisasi prosedur kerja dan budaya organisasi. Dalam kerangka teori Grindle (1980), aspek ini masuk dalam dimensi “*Context of Implementation*”, terutama pada indikator “*institution and regime characteristics*”, di mana struktur birokrasi dan mekanisme internal sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika organisasi hanya kuat di atas kertas namun lemah dalam budaya kerja dan sistem koordinasi, maka efektivitas kebijakan akan terganggu.

3.2.3 Respons Masyarakat

Respon masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan PPID dalam menjangkau publik. Berdasarkan wawancara dengan dua LSM dan tiga warga dari latar belakang berbeda, diketahui bahwa kesadaran masyarakat terhadap website PPID masih rendah. Temuan dari LSM:

- a. Website belum memuat informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sipil.
- b. Fitur pengaduan masih bersifat formalitas dan tidak selalu ditanggapi.

3.3 Dampak Pelaksanaan Kebijakan (Outcome)

Dimensi Outcome dalam teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) merujuk pada sejauh mana kebijakan menghasilkan dampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan tempat kebijakan diterapkan. Dalam konteks implementasi website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya, outcome yang diharapkan adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, efisiensi layanan, dan terwujudnya keterbukaan informasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan daerah.

3.3.1 Meningkatkan Transparansi Pemerintah Daerah

Dukungan transparansi ini tercermin dalam adanya dokumen-dokumen penting seperti anggaran daerah, laporan kinerja, dan data publik lainnya yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Shemy, perwakilan LSM YARA pada 20 Januari 2025, pukul 10.30 WIB:

“Website ini sudah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses informasi kepada publik. Meski masih ada beberapa kekurangan, transparansi secara keseluruhan sudah terlihat lebih baik.”

Namun, masih ada tantangan terkait pemutakhiran informasi yang belum selalu sesuai dengan perkembangan terbaru. Muammar Asmady, Kabid Komunikasi dan Informasi, mengungkapkan pada 12 Januari 2025, pukul 14.00 WIB:

“Meski website sudah lebih transparan, masalah utama adalah pemutakhiran data yang sering tertunda karena keterlambatan dari SKPD dalam mengirimkan informasi.”

3.3.2 Peningkatan Partisipasi Publik

Website PPID diharapkan dapat menjadi media bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan, terutama dalam memberikan masukan, saran, atau mengajukan permohonan informasi. Hal ini dapat memfasilitasi masyarakat untuk lebih berperan serta dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, meskipun ada akses informasi, kesulitan tetap ada karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui cara menggunakan website ini secara efektif. Berdasarkan wawancara dengan Rahmat Hidayat, seorang guru honorer pada 24 Januari 2025, pukul 12.00 WIB, ia menyatakan:

“Masyarakat masih merasa kebingungan untuk mengakses dan memanfaatkan website ini. Padahal, kalau dimanfaatkan dengan baik, seharusnya bisa meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan.”

Peningkatan partisipasi publik akan sangat bergantung pada intensitas sosialisasi mengenai keberadaan website dan bagaimana cara menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi website ini agar mereka merasa lebih terlibat.

3.3.3 Efisiensi Layanan Informasi

Implementasi website PPID ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik tanpa harus mengunjungi kantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis. Berbagai dokumen dapat diakses kapan saja tanpa perlu antri atau menunggu lama, yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lebih lama melalui prosedur manual.

Namun, meskipun efisiensi meningkat, kendala masih ada terkait kecepatan pemutakhiran informasi. Salah satu pengelola website, Achmad Rianda, mengungkapkan pada 12 Maret 2025, pukul 10.00 WIB :

“Kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperbarui informasi secara teratur, namun masih terkendala oleh data yang tidak selalu dikirim tepat waktu oleh SKPD. Hal ini menghambat kami untuk memberikan layanan yang lebih efisien.”

Dari sisi masyarakat, Zainal Abidin, seorang petani, mengungkapkan pada 23 Januari 2025, pukul 15.30 WIB:

“Saya merasa lebih mudah mendapatkan informasi secara online melalui website ini. Namun, saya masih merasa kesulitan ketika harus mencari data tertentu karena tampilan website yang agak rumit.”

3.3.4 Keterbukaan Informasi

Salah satu tujuan utama dari website PPID adalah tercapainya keterbukaan informasi di pemerintahan daerah. Berdasarkan evaluasi terhadap lima indikator utama e-Government, situs PPID Kabupaten Aceh Barat Daya memperoleh total estimasi skor sebesar 78 dari 100. Hal ini menempatkan

situs ini dalam kategori "Cukup Informatif" menurut standar Komisi Informasi Pusat. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan website ini telah berhasil menyediakan saluran terbuka untuk masyarakat dalam mengakses informasi terkait kebijakan publik, anggaran, dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, beberapa data untuk diakses secara rutin kadang tidak selalu tersedia atau diperbarui secara berkala.

Peningkatan keterbukaan informasi ini membutuhkan tambahan fitur atau layanan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam berkomunikasi langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat.

3.3.5 Evaluasi dan Perbaikan yang Berkelanjutan

Berdasarkan hasil evaluasi sementara, meskipun ada kemajuan yang signifikan, implementasi website PPID Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Keterlambatan pemutakhiran informasi: Website membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbarui konten dan dokumen yang ada, yang terkadang mengurangi kredibilitas dan fungsi dari website itu sendiri.
- Kurangnya pemahaman dan sosialisasi di kalangan masyarakat umum: Banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak memanfaatkan website dengan baik, sehingga peran website dalam mendorong partisipasi publik menjadi terbatas.
- Minimnya fitur interaktif: Pengembangan fitur-fitur seperti sistem pengajuan permohonan informasi, live chat, atau tracking pengaduan perlu ditingkatkan untuk mendukung interaksi lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berkaitan dengan rendahnya kualitas pembaruan informasi dan pengelolaan konten. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun website PPID telah ada dan dioperasikan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, masih terdapat masalah dalam hal pembaruan informasi yang tidak rutin serta keterbatasan dalam fitur interaktif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Tjoetra (2018), yang juga menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi keterbukaan informasi publik melalui website PPID adalah lambatnya pembaruan informasi dan minimnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Koordinasi yang baik di tingkat kebijakan memang ada, tetapi implementasi yang kurang maksimal menyebabkan informasi yang disajikan tidak selalu mencerminkan kondisi yang terkini dan relevan bagi publik.

Temuan utama lainnya adalah bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam efektivitas website PPID. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan website sangat bergantung pada inisiatif staf individu dan masih belum ada sistem pengelolaan yang terstandarisasi di seluruh instansi pemerintah. Hal ini berbeda dengan penelitian Degodona et al. (2021), yang lebih menekankan pada kesiapan teknis dan infrastruktur digital sebagai faktor utama dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini justru menemukan bahwa, meskipun teknologi sudah tersedia, masalah utama terletak pada kesiapan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoperasikan website secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola website menjadi hal yang sangat penting agar website PPID bisa berfungsi dengan baik.

Sama halnya dengan temuan penelitian oleh Santia & Mauliansyah (2023), yang menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk e-government, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan pemanfaatan website PPID masih rendah. Meskipun beberapa masyarakat di kota

kecamatan sudah mulai memanfaatkan website untuk mencari informasi, sebagian besar masyarakat di daerah terpencil tidak mengetahui adanya website PPID sama sekali. Temuan ini memperkuat temuan Santia & Mauliansyah yang menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi e-government bukan hanya terletak pada teknologi yang ada, tetapi juga pada kurangnya sosialisasi dan literasi digital yang memadai. Untuk meningkatkan pemanfaatan website PPID, dibutuhkan upaya yang lebih intensif dalam hal sosialisasi dan pendidikan literasi digital kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu adanya perbaikan dalam tiga aspek utama: kualitas pembaruan informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan bukti bahwa keberhasilan implementasi website PPID tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan pengelola dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi yang disediakan. Dengan memperbaiki ketiga aspek ini, diharapkan website PPID dapat berfungsi lebih efektif sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

3.5.1 Keterbatasan Akses Internet di Daerah Terpencil

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah keterbatasan akses internet di daerah terpencil Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menjadi faktor penghambat utama dalam mengakses website PPID. Meskipun website telah diimplementasikan untuk mendukung keterbukaan informasi publik, kualitas layanan sangat tergantung pada stabilitas jaringan internet. Hal ini menunjukkan pentingnya pemerataan akses infrastruktur internet untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah yang kurang terlayani oleh penyedia layanan internet.

3.5.2 Pentingnya Literasi Digital Masyarakat

Temuan menarik lainnya adalah rendahnya literasi digital masyarakat yang menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan website PPID. Masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang teknologi informasi cenderung kesulitan dalam mengakses dan menggunakan website PPID untuk memperoleh informasi publik. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital bagi masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses keterbukaan informasi.

3.5.3 Keterbatasan Fitur Interaktif di Website PPID

Temuan lain yang menarik adalah minimnya fitur interaktif di website PPID, seperti mekanisme pengaduan yang responsif dan forum diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun website menyediakan informasi yang bermanfaat, fungsinya sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa selain menyediakan informasi, website PPID juga perlu dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan interaksi aktif antara pemerintah dan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan informasi publik.

3.5.4 Komitmen Politik Pimpinan Daerah

Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan politik dari pimpinan daerah sangat berperan dalam kelancaran implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui website PPID. Meskipun ada komitmen politik yang kuat, seperti penyusunan Peraturan Bupati dan alokasi anggaran untuk website, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan optimal kebijakan ini. Dukungan politik yang kuat perlu diikuti dengan tindakan konkrit dalam pengalokasian sumber daya yang memadai untuk mendukung kelancaran operasional website.

IV. KESIMPULAN

Implementasi website PPID di Kabupaten Aceh Barat Daya bergantung pada koordinasi antar instansi, kapasitas sumber daya manusia, dan aksesibilitas teknologi. Meskipun ada dukungan politik, tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, serta pengelolaan konten yang tidak terstandarisasi. Selain itu, keterbatasan anggaran dan SDM menghambat efektivitas implementasi. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sosialisasi dan fitur interaktif sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui website PPID.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan website PPID, yang menghambat efektivitas operasional website dalam menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Selain itu, penelitian ini tidak dapat sepenuhnya mengukur dampak jangka panjang dari implementasi website PPID terhadap peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak instansi terkait, yang berpotensi mengandung bias atau kekurangan informasi, sehingga membatasi keakuratan temuan. Terakhir, keterbatasan waktu dalam pengumpulan data mengurangi kesempatan untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap perubahan dinamika penggunaan website PPID oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Untuk meningkatkan efektivitas implementasi website PPID, penelitian di masa depan dapat mengarah pada penerapan teknologi yang lebih canggih, seperti integrasi sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau dan menganalisis data website secara otomatis. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemeliharaan konten, memperbarui informasi secara real-time, dan mengidentifikasi pola penggunaan website oleh masyarakat untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dengan sensor pintar yang terhubung ke website untuk memantau kualitas informasi yang disediakan. Penelitian juga dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi pemetaan interaktif dan analitik berbasis data besar (big data) untuk mengevaluasi efektivitas distribusi informasi di wilayah yang berbeda. Selain itu, upaya peningkatan literasi digital dan sosialisasi secara lebih masif kepada masyarakat juga perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan website PPID dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DISKOMINSA) Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh staf dan pihak terkait di pemerintah daerah yang telah membantu memberikan informasi, wawasan, serta dukungan yang sangat berharga. Tanpa bantuan dan kerjasama dari instansi-instansi tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah, A. (2022). Pengaruh Kualitas Website “Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid)” Terhadap Kepuasan Pengguna Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 80–96.
<https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2709>
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). *Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang*. 11(02),

- 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i1.158>
- Degodona, P., Lumban Raja, R., & Buulolo, T. J. (2021). Implementasi Kinerja Uu No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 242–256. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.477>
- Grindle, M. S. (1980). *Political and Policy Implementation in The Third World*. Prince University Press.
- Liu, & Ping, G. (2025). Tracking Control of Multi-Agent Systems Using a Networked Predictive PID Tracking Scheme. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, Vol 10(May), 123030. <https://doi.org/10.1109/JAS.2023.123030>
- Mokobombang, W., Syafaruddin, S., Syafaruddin, A. R. A., Khaeriyah, K., & Natsir, N. (2023). Dampak Perubahan Layanan Publik Yang Disebabkan Oleh Teknologi Dan Media Sosial. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(1), 348–359. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.4180>
- Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.2021>
- Nasution, M. I. P. (2024). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL : PERSPEKTIF MASA DEPAN. 2(12), 25–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3018>
- Pratama, S. Y., Lambelanova, R., & Indrayani, E. (2017). Implementasi keterbukaan informasi publik pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumedang provinsi jawa barat. 97, 409–424. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.443>
- Santia, N., & Mauliansyah, F. (2023). Analisis Pemanfaatan Sp4n Lapo Untuk Meningkatkan E-government di Diskominsa Aceh Barat Daya. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 461–473. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1676>
- Simangunsong F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Swadati, N. E., & Sfenrianto. (2022). Analysis of Factors Affecting User Acceptance of The Ministry of Defense Information and Documentation Management Officer (PPID) Website. *Journal of System and Management Sciences*, 12(6), 415–438. <https://doi.org/10.33168/JSMS.2022.0625>
- Tejedo-romero, F., Filipe, J., Esteves, F., Jesus, M., & Ribeiro, G. (2025). The usability of Brazilian government open data portals : ensuring data quality. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04404-y>
- Tjoetra, A. (2018). Peningkatan Kepatuhan Badan Publik Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Community*, 3(1), 14–33. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i1.143>
- Utomo, D. D., Tumija, & Pangemanan, A. (2021). Implementation of the Regional Management Information System in Ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Bitung City, North Sulawesi Province. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 8(2), 74–101. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2781>